

Masalah Perbatasan dan Intensitas Konflik Di Afrika

Citra Hennida

Dosen Program Studi Hubungan Internasional
FISIP Universitas Airlangga Surabaya

e-mail: citra_hennida@gmail.com

ABSTRACT

The intensity of the civil war in the nations of africa is high. Rebel movements become difficult to overcome, one of the problem because the involvement of countries outside the state of that which is undergoing a conflict. This shows the lack of parts of the border in Africa. A question proposed is what causes parts of the border in african countries weak? Then what contribution to the intensity of the civil war in african countries? This article argue that the border area in african countries is weak caused by a legacy of colonial who divide an area of the state with the scattered ethnic groups, obscures the reality economic reasons related to natural resources which its existence cross-border countries, and the lack of a political commitment to strengthen national boundaries. Three it is indicated that there is actually no borders of a territory in africa and control over parts of the border is ineffective.

Keywords: border menagement, civil conflict, Africa.

Intensitas perang sipil di negara-negara Afrika adalah tinggi. Gerakan-gerakan pemberontak menjadi sukar untuk diatasi, salah satu masalahnya karena keterlibatan negara-negara diluar negara yang sedang mengalami konflik. Ini menunjukkan lemahnya wilayah-wilayah perbatasan di Afrika. Pertanyaan yang diajukan adalah apa yang menyebabkan wilayah-wilayah perbatasan di negara-negara Afrika lemah? Lantas apa kontribusinya terhadap intensitas perang sipil didalam negara-negara Afrika? Artikel ini berargumen bahwa wilayah perbatasan di negara-negara Afrika adalah lemah disebabkan oleh warisan kolonial yang membagi wilayah negara dengan mengaburkan realitas sebaran kelompok etnis, alasan-alasan ekonomi terkait sumber daya alam yang keberadaannya lintas batas negara, dan lemahnya komitmen politik untuk memperkuat batas-batas negara. Tiga hal tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya tidak ada batas-batas wilayah di Afrika dan kontrol atas wilayah-wilayah perbatasan adalah tidak efektif.

Kata-Kata Kunci: manajemen wilayah perbatasan, konflik sipil, Afrika.

Perang sipil di Afrika jumlahnya banyak dan masif. Gerakan-gerakan pemberontak ini menjadi sukar untuk diatasi, salah satu masalahnya adalah karena keterlibatan negara-negara diluar negara yang sedang mengalami konflik. Misalnya saja perang sipil di Sierra Leone yang mendapat dukungan dari pemerintah Charles Taylor di Liberia. Contoh lainnya adalah konflik di DRC yang melibatkan tujuh negara yaitu Namibia, Zimbabwe, Angola, Chad, Libya, Uganda dan Sudan. Negara-negara ini kemudian terbagi antara yang mendukung pemerintah dan yang mendukung pemberontak. Pelibatan banyak negara atas konflik di satu negara dipicu oleh

lemahnya pengawasan dan pembangunan di wilayah-wilayah perbatasan. Ouchou dan Crush (2001, 146) menyatakan bahwa kontrol wilayah-wilayah perbatasan di Afrika adalah tidak efektif. Oleh karenanya, wilayah perbatasan di Afrika dianggap sebagai sesuatu yang tidak nyata atau tidak ada. Kaplan (2000, 8) juga menyatakan hal yang serupa. Tingginya permasalahan sosial dan politik di negara-negara Afrika mengakibatkan tingginya mobilitas kelompok yang semakin melemahkan wilayah perbatasan. Perbatasan yang lemah mengakibatkan konflik tidak bisa dilokalisasi hanya di wilayah konflik. Kontrol pemberontak terhadap wilayah-wilayah perbatasan menjadi menguat. Penggunaan wilayah negara lain sebagai basis perlawanan mendatangkan keuntungan-keuntungan seperti sebagai strategi untuk tidak terikat pada yurisdiksi negara, hemat biaya, dan meningkatkan posisi tawar (Salehyan 2007, 237).

Berangkat dari latar belakang permasalahan diatas, artikel ini mendiskusikan hubungan antara lemahnya batas wilayah dengan intensitas konflik yang ditimbulkan. Pertanyaannya adalah apa yang menyebabkan wilayah-wilayah perbatasan di negara-negara Afrika lemah? Lantas apa kontribusinya terhadap intensitas perang sipil didalam negara-negara Afrika? Argumen yang dibangun adalah batas wilayah negara-negara Afrika lemah dikarenakan oleh warisan kolonial yang membagi batas-batas negara tidak berdasar realitas sebaran kelompok etnis, adanya sumber daya alam yang keberadaannya lintas negara yang dikelola oleh MNC, dan lemahnya komitmen politik untuk meningkatkan pengawasan dan pembangunan wilayah-wilayah perbatasan. Akibatnya, pergerakan kelompok pemberontak menjadi lebih leluasa dan intervensi dari negara-negara di sekitar menjadi lebih intensif. Hal inilah yang mengakibatkan intensitas konflik meningkat.

Warisan Kolonial dan Masalah dalam Manajemen Wilayah Perbatasan

Afrika merupakan benua yang dihuni oleh 54 negara berdaulat, 9 wilayah, dan 2 wilayah negara merdeka dengan kewenangan terbatas. Wilayah-wilayah ini terbagi dalam 165 wilayah perbatasan yang menempatkan Afrika kedalam wilayah yang paling terfragmentasi (Ikome 2012, 3). Negara-negara di Afrika terbentuk sebagai hasil dari dekolonisasi setelah Perang Dunia II. Berdasarkan prinsip *uti possidetis juris*, negara-negara di Afrika mewarisi batas-batas wilayah yang ditetapkan oleh kolonial Eropa. Hal ini diatur pada saat Konferensi Berlintahun 1884-1885. Pemerintah-pemerintah kolonial menetapkan partisi negara-negara Afrika dalam konferensi tersebut. Tidak hanya itu, pemerintah kolonial juga menetapkan kelompok-kelompok etnis yang menjadi dominan di wilayah tertentu. Dominasi etnis tertentu melalui politik *divide and conquer* ini digunakan untuk merekrut orang lokal untuk pekerjaan administratif dan pengawasan aset pemerintah kolonial. Proses ini selesai tahun 1919. Batas-batas wilayah negara ini kemudian diperkuat oleh Organization of African Unity(OAU). Resolusi OAU di tahun 1964 mengatur mengenai batas-batas wilayah negara di Afrika. Batas-batas wilayah tersebut adalah batas wilayah yang diperoleh atau diwarisi dari penguasa kolonial ketika negara-negara di Afrika memperoleh kemerdekaannya (Herbst 1989).

Batas wilayah negara (*border*) merupakan batas atau garis imajiner yang membatasi kepemilikan satu atas lainnya. Ketika garis ini melibatkan negara maka disebut sebagai batas internasional yang kemudian masing-masing negara mendefinisikan yurisdiksinya dalam batas-batas tersebut. Laremont (2005, 1-2) mengatakan bahwa batas wilayah yang jelas memiliki fungsi untuk menciptakan wilayah dan masyarakat yang stabil, pembentukan institusi negara, dan pembentukan kepemilikan nasional.

Oleh karenanya, wilayah perbatasan yang stabil akan menentukan stabil tidaknya sebuah negara.

Sayangnya, penentuan batas wilayah di negara-negara Afrika yang cenderung "dipaksakan" oleh pihak kolonial memicu instabilitas wilayah perbatasan. Laremont (2005, 2-6) menyatakan bahwa sejak kemerdekaannya, batas wilayah negara-negara Afrika adalah tidak dapat dikonsolidasikan. Hal ini terbukti dari masih banyaknya perpanjangan kekuasaan negara lain ke dalam wilayah negara lainnya. Lebih lanjut Laremont mengatakan bahwa perbatasan negara-negara Afrika adalah *porous*, tidak terjaga dan tidak dapat dijaga. Kondisi ini disebabkan oleh pembagian batas wilayah oleh pemerintah kolonial.

Hal ini memicu konflik laten. Batas wilayah negara tidak sinergis dengan batas wilayah etnis. Etnisitas memiliki perilaku publik dan individu yang tidak bisa dibatasi oleh batas-batas wilayah negara. Ketika batasan etnis ini dipolitisir maka yang muncul kemudian adalah konflik etnis (Jackson dan Rosberg 1982). Dipolitisir disini maksudnya adalah belum adanya sistem negara yang memfasilitasi keragaman etnis tersebut. Politik Afrika dicirikan sebagai sistem partai politik yang kompetitif. Politik Afrika lebih menyukai model monopoli politik. Model ini lantas meminggirkan munculnya konsep federalisme dan kebebasan. Beberapa konflik etnis muncul di Afrika seperti: Sudan (1956-1972), Rwanda (1959-1964), Zaire (1960-1965; 1977-1978); Ethiopia (1962-1982); Zanzibar (1964); Burundi (1966-1972); Chad (1966-1982); Uganda (1966; 1978-1982); Nigeria (1967-1970); Angola (1975-1982).

Warisan kolonial meninggalkan birokrasi yang lemah dan sistem pemerintahan yang lemah pula. Birokrasi lemah maksudnya disini adalah adanya kekuasaan-kekuasaan diluar pemerintah resmi yang juga memiliki kuasa. Pemerintah kolonial memperbolehkan adanya kekuatan-kekuatan *Paramount Chief*. Kekuatan-kekuatan ini sifatnya adalah diwariskan dan bersifat seumur hidup. Mereka ini kemudian memiliki peran dalam mengatur ekonomi dan hukum di tingkat lokal atau masyarakat adat (Keen 2003; Denov 2010; Peters 2011). Mereka diberi kuasa dengan sistem royalti yang harus dibayarkan ke penguasa kolonial. Setelah pemerintah kolonial pergi, kekuatan-kekuatan ini berubah menjadi lebih independen dan sulit untuk diintervensi dan dikontrol oleh pemerintah. Persaingan antar *paramount chief* ini mengakibatkan terbagi-baginya kekuasaan di tingkat lokal, instabilitas, korupsi, budaya kekerasan, rezim otoriter di tingkat lokal, dan semakin meminggirkan kelompok marginal seperti perempuan, anak-anak dan kelompok miskin lainnya. Kelompok-kelompok ini semakin terpinggirkan dikarenakan *Paramount Chief* dipilih oleh keluarga-keluarga yang berkuasa dalam suatu wilayah. Otomatis mereka menjadi pelayan bagi keluarga-keluarga berkuasa tersebut (Keen 2005; Denov 2010).

Peters (2011) juga menambahkan bahwa pemerintah resmi yang dibentuk paska kolonial lebih bersifat sebagai pemerintah bayangan. Disatu sisi, kuasanya tidak lebih kuat dari *paramount chief*, disisi lain, pemerintah berkuasa ini juga dibawah kontrol perusahaan-perusahaan pertambangan khususnya pertambangan permata yang merupakan komoditas utama. Lemahnya pemerintah yang dibentuk dan banyaknya tarik-menarik kekuatan mengakibatkan masyarakat semakin termarginalkan, jauh dari akses-akses publik.

Kekayaan negara yang didapat dari pertambangan juga dikuasai oleh rezim yang berkuasa. Kekayaan ini tidak kemudian digunakan untuk memperkuat institusi negara dan militer, melainkan digunakan untuk "membeli" loyalitas pemimpin-

pemimpin militer. Pilihan untuk lebih memperkuat hubungan secara personal dengan pemimpin-pemimpin ketimbang memperkuat institusi militernya dilandasi juga oleh ketakutan bahwa dengan semakin kuatnya institusi militer akan dapat mengancam kekuasaan rezim. Namun, lemahnya institusi militer baik secara anggaran dan kemampuan, mengakibatkan penguatan kelompok-kelompok pemberontak. Kelompok-kelompok pemberontak menjadi sulit dibasmi dan memiliki kemampuan yang lebih ketimbang militer resmi (Keen 2003). Situasi-situasi ini selanjutnya memunculkan perang sipil. Ini adalah permasalahan pertama dimana pihak kolonial memang mewariskan sistem politik tapi tidak kemudian memperhatikan struktur masyarakat dan sejarah etnis di wilayah kolonial.

Permasalahan kedua adalah lemahnya pemahaman atas konsep negara modern di negara-negara Afrika. Lebih jauh Cooper (2002) mengatakan bahwa pemerintah kolonial mendirikan institusi seperti birokrasi, militer, kantor pos, dan legislasi sebagai syarat berdirinya sebuah negara merdeka. Pemahaman sebagai sebuah negara merdeka ini dimaknai bahwa negara (elit) memiliki hak atas apa yang ada diwilayahnya. Jadi mau negara tersebut gagal atau tidak, pengakuan ini harus tetap ada. Masalah ketiga pada warisan kolonial di Afrika adalah tanggung jawab pembangunan ada pada negara kolonialnya, melalui masyarakat koloninya. Bahwa yang berhak dan bertanggungjawab atas pembangunan Afrika adalah masyarakat Afrika sendiri. Jadi masalah adalah pada siapa masyarakat Afrika itu. Banyaknya kelompok-kelompok etnis membuat saling klaim atas siapa yang paling berhak atas pembangunan. Akibatnya, pergantian kekuasaan kerap terjadi dan ketika berkuasa, kesejahteraan hanya ditujukan untuk kelompoknya.

Di Sierra Leone misalnya, perang sipil di Sierra Leone berlangsung antara tahun 1991 sampai 2002. Kelompok pemberontak Revolutionary United Front (RUF) memiliki kapabilitas militer yang lebih maju dibanding militer pemerintah yaitu The Republic of Sierra Leone Military Forces (RSLMF). RSLMF hanya memiliki tentara sebanyak 14.000 personel dimana separuh diantaranya direkrut secara paksa dan mendapatkan pelatihan militer yang minim. Celakanya, beberapa anggota RUF juga menjadi anggota RSLMF. Hal ini disebut sebagai 'sobels' (*soldier by day, rebel by night*). Praktis untuk menghandalkan RSLMF saja dalam menekan pemberontakan RUF adalah tidak mungkin. Untuk membantu militer pemerintah, pemerintah Kabila menyewa jasa Executive Outcomes (EO), sebuah perusahaan jasa perlindungan privat yang berbasis di Afrika Selatan. Bulan Mei 1995, kontrak ditandatangani selama empat tahun (Howe 1998).

RUF berhasil ditekan dan beberapa wilayah tambang dapat dikuasai kembali oleh pemerintah. Tahun 1996, presiden terpilih Kabbah memutuskan kontrak dengan EO dan dibentuk pertahanan masyarakat sipil yang terdiri atas kelompok masyarakat adat pemburu seperti Mende *Kamajohs*, Temne *Kapras*, and Koranko *Tamaboros*. Sayangnya, baik RSLMF dan kelompok pertahanan masyarakat sipil tidak dalam komando pemerintah. Ketidakmampuan pemerintah Kabbah untuk merangkul semua pihak dalam kuasanya berkontribusi pada tidak selesainya perang sipil. Perjanjian Abidjan 1996 tidak lantas membuat perang sipil serta merta berakhir. Anggota-anggota RUF yang telah dilucuti tidak kemudian mendukung pemerintah dan kemudian malah bergabung dengan Armed Forces Revolutionary Council (AFRC), bentukan para jenderal yang diasingkan oleh pemerintah Kabbah.

Kasus Sierra Leone juga menunjukkan keterlibatan negara asing yang tinggi. Liberia dan Burkina Faso mendukung pihak pemberontak. Keterlibatan Liberia dikarenakan pemerintah Sierra Leone terlibat dalam pasukan perdamaian yang dibentuk oleh

komunitas ekonomi negara-negara di Afrika Barat, Economic Community of West African States Monitoring Group (ECOMOG) yang kemudian berkontribusi pada kegagalan usaha-usaha Charles Taylor (presiden Liberia saat itu) untuk merebut kursi presiden. Persenjataan para pemberontak di Sierra Leone disuplai melalui Liberia. Senjata berasal dari Libya yang kemudian dikirim ke Burkina Faso lalu Pantai Gading sampai ke Liberia, untuk selanjutnya masuk ke Sierra Leone.

Lemahnya manajemen perbatasan juga memudahkan penyelundupan permata oleh pemberontak. Permata digunakan untuk membiayai perang dengan pembelian senjata dan logistik. Permata ditambang oleh pemberontak di wilayah-wilayah dekat perbatasan untuk kemudian dikirim keluar melalui Liberia. Apalagi baik Sierra Leone dan Liberia adalah penghasil permata. Mereka memiliki pasar permata yang sama. Ini juga salah satu alasan mengapa Liberia ikut terlibat aktif dalam konflik di Sierra Leone (Richard 1996).

SumberDaya di Wilayah Perbatasan

Hubungan antara intensifikasi perang sipil, sumber daya, dan keterlibatan pihak-pihak diluar negara adalah dekat. Negara yang memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap sumber daya tertentu berpotensi memunculkan konflik (Collier dan Hoeffler 2001). Doyle dan Sambanis (2000) mengatakan bahwa perang sipil berlangsung lebih lama di negara yang tingkat ketergantungannya terhadap komoditas ekspor utama adalah besar. Buhaug dan Gates (2002) berpendapat bahwa keberadaan bahan mineral di wilayah konflik berpotensi untuk meningkatkan skala geografis konflik, artinya turut memperbesar keterlibatan negara-negara disekitar. Ross (2004) menambahkan bahwa tidak hanya intervensi asing yang berkontribusi terhadap durasi konflik melainkan juga ada kontribusi kontrak dari para pencari perang atau jasa perlindungan swasta.

Keberadaan sumber daya alam dalam wilayah konflik turut mengundang intervensi asing dalam wilayah konflik. Ross (2004) menyajikan bahwa ada tiga skenario terhadap hubungan antara sumber daya dan konflik, yaitu sumber daya memunculkan konflik, sumber daya menentukan durasi konflik, dan sumber daya menentukan intensitas konflik. Skenario pertama terjadi ketika empat kondisi ini terpenuhi (a) pihak pemberontak memperoleh uang dengan cara mengekstraksi dan menjual komoditas secara langsung atau mengambil uang dari pihak-pihak yang melakukan itu; (b) ketika pembagian atas sumber daya tersebut tidak berimbang, berdampak buruk terhadap lingkungan, serta memunculkan banyak migrasi tenaga kerja di kantong-kantong eksplorasi sumber daya; (c) ketika penduduk di wilayah-wilayah sumber daya tersebut berniat memisahkan diri; (d) ketika kepemilikan sumber daya malah melemahkan birokrasi seperti munculnya korupsi.

Skenario kedua terjadi ketika (a) sumber daya digunakan sebagai "mata uang" untuk membeli senjata dan logistik bagi pihak pemberontak; (b) sumber daya digunakan sebagai insentif perjanjian perdamaian kepada pihak yang bertikai; (c) sumber daya digunakan sebagai usaha pemerintah untuk meningkatkan anggaran pada wilayah yang berkonflik. Skenario ketiga terjadi ketika (a) pihak bertikai berperang atas wilayah tersebut padahal nilainya tidak seberapa; (b) pihak bertikai bekerjasama untuk mengeksploitasi sumber daya yang ada. Ross (2004) juga menambahkan bahwa hubungan antara sumber daya dan konflik bisa juga terjadi ketika asing mengintervensi dengan memberi dukungan kepada kelompok pemberontak yang menguasai wilayah sumber daya. Atau, bisa jadi dukungan asing diberikan dengan

niat untuk melemahkan pemerintah agar sumber daya negara tersebut dapat dikuasai.

Sedangkan Collier dan Hoeffler (2001) menghubungkan antara sumber daya dan konflik dalam dua motif yaitu motif atas nama keserakahan (*grievances of rebel organizations*); dan motif *funding*. Motif keserakahan menjelaskan bahwa konflik terjadi ketika pihak bertikai tidak sepakat atas distribusi hasil sumber daya, atau juga terjadi ketika salah satu pihak berniat untuk menguasai sumber daya tersebut. Motif *funding* menjelaskan bahwa sumber daya alam sifatnya tetap, artinya dia tidak dapat dipindahkan pabriknya, berbeda dengan industri manufaktur misalnya. Akibatnya, penguasaan wilayah sumber daya diperlukan, dan membiayai penguasa sumber daya ini diperlukan untuk menjaga pasokan. Hal-hal tersebut terjadi di Sierra Leone dan DRC.

Sumber daya utama Sierra Leone adalah berlian. Selain berlian, sumber daya potensial Sierra Leone adalah titanium, bauksit, emas dan rutil. Berlian sifatnya mudah diekstraksi sehingga mobilitasnya tinggi. Kelompok pemberontak RUF menguasai tambang-tambang berlian. Karena sifatnya yang mudah ditambang, industri berlian di Sierra Leone bersifat padat karya. Sebelum munculnya konflik sipil, ada sekitar tiga puluh ribu penambangan berlian skala kecil. Struktur industri berlian didominasi oleh Sierra Leone Selection Trust (SLST), yang merupakan anak perusahaan De Beers yang berkantor pusat di Afrika Selatan untuk kawasan Afrika, dan the National Mining Company (Williams 1995). Tambang-tambang berlian di Sierra Leone ini juga ada dalam mekanisme Alluvial Diamond Mining Scheme dimana berlian berada di endapan-endapan sungai dan sekitar sungai. Izin penambangan dari pemerintah dibatasi hanya enam bulan dan dengan luas wilayah sewa 400meter persegi. Hal ini tidak terjangkau oleh masyarakat Sierra Leone yang pendapatan perkapitanya hanya US\$ 198. Tidak hanya itu, sifat rakus penguasa dan model *clientism* menambah kebencian masyarakat lokal terhadap penguasa. Terlebih lagi ini mengundang MNC berlian dan memunculkan kecemburuan di masyarakat lokal. Hal-hal inilah yang kemudian memicu perang.

Wilayah-wilayah berlian sifatnya lintas wilayah negara. Hal ini memunculkan intervensi negara lain di dalam konflik. Intervensi ini juga muncul dikarenakan oleh keterlibatan MNC. MNC yang sama dan beroperasi di banyak negara mengakibatkan konflik tidak hanya berlaku di satu negara. Misalnya oleh MNC De Beers. De Beers mengontrol suplai berlian dunia dan beroperasi di banyak negara Afrika. Untuk Sierra Leone, konfliknya mendapat intervensi dari Liberia dibawah rezim Charles Taylor. Seperti yang sudah dideskripsikan dibagian lain tulisan ini, pemerintah Charles Taylor membuka wilayah perbatasannya bagi para pemberontak. Pemberontak bebas jual beli berlian dan menukarkannya dengan logistik perang.

Komitmen Politik di Wilayah Perbatasan

Negara-negara Afrika memiliki kelemahan dalam mempertahankan batas-batas wilayahnya. Kedaulatan secara formal hanya diakui oleh masyarakat diluar, tapi bukan masyarakat didalamnya. Datangnya bantuan luar negeri dan bantuan militer ini melihat pada kedaulatan nasional yang diakui secara internasional. Faktanya, kedaulatan itu samar, batas-batas negara itu samar. Jackson dan Rosberg (1982) menyatakan bahwa batas-batas internasional secara timbal balik diakui namun hanya batasan artifisial dimana wilayah suatu negara berakhir dan wilayah negara lainnya dimulai. Batas wilayah negara biasanya dibuat berdasar atas perjanjian

antara negara-negara yang bersebelahan. Perubahan batas wilayah juga kerap terjadi akibat dari perang dan sengketa. Di Afrika, batas wilayah tidak bergeser, namun lemah, sehingga yang terjadi adalah seolah-olah batas tersebut tidak ada. Oucho dan Crush (2001) menyatakan bahwa kontrol wilayah-wilayah perbatasan di Afrika adalah tidak efektif. Oleh karenanya, wilayah perbatasan di Afrika dianggap sebagai sesuatu yang tidak nyata atau tidak ada.

Ada dua tantangan terkait dengan pembangunan wilayah perbatasan yang lemah, yaitu pembangunan infrastruktur perbatasan dan pembiaran atas wilayah perbatasan (Ikome 2012, 6). Kurangnya pembangunan infrastruktur berdampak pada munculnya transaksi-transaksi yang sifatnya informal. Sedangkan pembiaran wilayah perbatasan berdampak pada munculnya kantong-kantong kriminalitas, teroris, dan pemberontak. Addo (2006) dan Salehyan (2007) menambahkan munculnya kantong-kantong pemberontak disebabkan oleh mobilitas mereka yang tinggi di wilayah-wilayah perbatasan. Mobilitas terjadi karena terbatasnya kemampuan petugas di perbatasan, dan lemahnya keinginan politik penguasa untuk memperkuat wilayah perbatasan.

Di DRC dan Sierra Leone, distribusi sumber daya menjadikan wilayah perbatasan ini lemah. Negara-negara penghasil berlian ini terhubung dalam jalur perdagangan berlian yang kompleks, yang melibatkan kelompok pemberontak dan korporasi besar (MNC). Komitmen politik penguasa untuk penguatan wilayah perbatasan lemah juga dipengaruhi oleh kepentingan penguasa atas jalur ekspor impor untuk kesejahteraan kelompoknya. Kelompok-kelompok di Afrika ada banyak. Mereka berkelompok atas nama ikatan etnis, pedagang yang terdiaspora, atau jaringan keagamaan. Di bagian lain tulisan ini juga telah dijelaskan bahwa kelompok-kelompok ini melihat oposisi layaknya suku lain. Sehingga yang muncul adalah sistem patronasi dan sistem rivalitas yang lantas melemahkan komitmen politik atas wilayah perbatasan (Cooper 2002).

Reno (2001) menambahkan bahwa lemahnya komitmen politik untuk memperkuat wilayah perbatasan dipengaruhi oleh hubungan negara dengan korporasi swasta. Korporasi-korporasi swasta tersebut berjaringan secara transnasional. Beberapa penguasa di negara-negara lemah menganggap dirinya sebagai mediator berlangsungnya transaksi bisnis. Mereka beranggapan bahwa mereka bisa memanipulasi transaksi perdagangan dan karena kemampuan tersebut, bisa menguatkan posisinya sebagai mediator. Bagi penguasa di negara-negara lemah, hubungan ini menciptakan kekuasaan politik yang sifatnya ekstrateritori. Pemerintah di negara-negara lemah memanipulasi hubungan perdagangan dan merekrut perusahaan-perusahaan asing sebagai sekutunya untuk melawan pemberontakan-pemberontakan di dalam negara.

Tindakan-tindakan ini tentu saja dilakukan secara informal dan melemahkan kapasitas penjaga perbatasan memang disengaja. Mereka tidak hanya mengontrol wilayah yang diakui secara internasional sebagai wilayah negara tapi juga memperluas pengaruhnya kepada orang, masyarakat dan wilayah diluar wilayah negaranya. Jackson (1993) menyatakan bahwa lemahnya kapasitas penjaga perbatasan diakibatkan oleh ketidakmauan negara-negara non-Afrika pemberi bantuan untuk meningkatkan kapabilitas birokrasi, termasuk para penjaga perbatasan. Kondisi ini diperparah dengan semakin menurunnya jumlah bantuan luar negeri dan semakin ketatnya prasyarat bantuan membuat posisi MNC semakin kuat. Di Zaire, bantuan luar negeri menurun dari US\$823 juta di tahun 1990 menjadi US\$178 juta ditahun 1993. Hal ini berimplikasi pada patron dari Presiden

Mobutu. Bantuan tersebut juga beralih. Dari dulunya dikelola oleh agen seperti USAID sekarang dialihkan ke MNC seperti US Export-Import Bank (Schraeder et al. 1998). Prancis melalui Coface, Agence Francaise de Developpement. Korea melalui the Korean Export Insurance Corporations. Terbatasnya sumber-sumber luar akibat pembatasan bantuan juga membuat kelompok-kelompok pemberontak dan pemerintah mencari alternatif sumber-sumber lokal. Pemerintahan negara tetangga bisa menjadi pilihan. Salah satunya adalah Charles Taylor di Liberia.

Reno (2001) berpendapat bahwa instabilitas politik bermanfaat bagi investasi asing. MNC yang memiliki hubungan baik dengan pemerintah di negara-negara lemah memiliki kemudahan akses kepada sumber daya negara dimaksud. Hal ini dilakukan di wilayah-wilayah *enclave* pertambangan. Baik MNC dan pemerintah tidak perlu bertanggung jawab atas biaya sosial, peraturan, dan usaha penyelamatan pasar lokal. Mereka hanya bertanggung jawab untuk menjaga pasokan atas pasar luar. Di DRC, perusahaan-perusahaan milik Kanada, Australia dan Afrika Selatan banyak beroperasi di banyak *enclave* pertambangan. Pemerintah yang lemah juga mencegah pemerintah untuk campur tangan dalam urusan perusahaan. Perusahaan bisa bebas menyewa jasa pengaman untuk mengamankan asetnya. Dengan begitu pemerintah tidak bisa ikut campur. Hal ini mengundang datangnya jasa pengaman privat dari negara-negara sekitar. Misalnya yang terjadi di Sierra Leone, dimana Branch Energy menggunakan jasa pengamanan militer Afrika Selatan. Jasa pengamanan ini juga memberikan latihan militer ke kelompok-kelompok bersenjata disekitar wilayah tambang. Secara tidak langsung mereka berkontribusi terhadap berkembangnya kelompok-kelompok pemberontak ini (Venter 1997).

Kesimpulan

Perang sipil di Sierra Leone dan DRC menjadi berlarut-larut dan lama diakibatkan oleh lemahnya manajemen di wilayah-wilayah perbatasan. Manajemen wilayah perbatasan menjadi lemah disebabkan oleh tiga hal, yaitu warisan kolonial yang membagi batas-batas negara tidak berdasar realitas sebaran kelompok etnis, adanya potensi sumber daya yang keberadaannya lintas negara, dan lemahnya komitmen politik untuk memperkuat batas-batas negara.

Ada dua hal yang membuat lemah manajemen perbatasan akibat warisan kolonial. Pertama, pemerintah kolonial menentukan batas wilayah yang "dipaksakan". Batas wilayah negara tidak sinergis dengan batas wilayah etnis. Ketika batas etnis ini dipolitisir maka yang muncul kemudian adalah konflik etnis. Kedua, warisan kolonial meninggalkan birokrasi dan sistem pemerintahan yang lemah. Birokrasi dilemahkan dengan munculnya kekuatan *paramount chief*. Mereka ini kemudian memiliki peran dalam mengatur ekonomi dan hukum di tingkat lokal atau masyarakat adat.

Potensi sumber daya yang ada di wilayah perbatasan adalah variabel kedua yang melemahkan manajemen perbatasan. Keberadaan sumber daya alam dalam wilayah konflik turut mengundang intervensi asing dalam wilayah konflik. Terlebih lagi ketika ekstraksi sumber tambang tersebut melibatkan perusahaan yang sama. Untuk mengamankan pasokan, perusahaan bekerja sama dengan negara untuk melakukan intervensi.

Variabel terakhir adalah lemahnya komitmen politik penguasa untuk penguatan wilayah perbatasan. Hal ini dipengaruhi oleh pertama, kepentingan penguasa atas

jalur ekspor impor untuk kesejahteraan kelompoknya. Disini, pemerintah bukan bertindak sebagai regulator, melainkan mediator dalam bisnis internasional. Mereka mengamankan kepentingan kelompok dan bersikap hirau atas perilaku MNC selama MNC itu memberikan kontribusi tetap terhadap penguasa. Kedua, ada permasalahan sistem patronasi dan sistem rivalitas yang lantas melemahkan komitmen politik atas wilayah perbatasan. Ketiga, lemahnya kapasitas penjaga perbatasan diakibatkan oleh ketidakmauan negara-negara non-Afrika pemberi bantuan untuk meningkatkan kapabilitas birokrasi, termasuk para penjaga perbatasan.

Daftar Pustaka

Buku

- Cooper, F., 2002. *Africa Since 1940: The Past and The Present*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Denov, M., 2010. *Child soldiers: Sierra Leone's Revolutionary United Front*. New York: Cambridge University Press.
- Laremont, RR., 2005. *Borders, Nationalism, and the African State*. London: Lynne Reiner.
- Nugent, P dan Al Asiwaju, 1998. *African Boundaries*. London: Printer.
- Peters, K., 2011. *War and the Crisis of Youth in Sierra Leone*. Cambridge: Cambridge University Press.

Artikel dalam Buku

- Reno, W., 2001. "How Sovereignty Matters: International Markets and the Political Economy of Local Politics in Weak States", dalam Thomas Claaghy, Ronald Kassimirdan Robert Latham (eds), 2001. *Intervention and Transnationalism in Africa: Global-Local Networks of Power*. Cambridge: Cambridge Uni Press.

Artikel Online

- Keen, D., 2003. "Greedy Elites, Dwindling Resources, Alienated Youths: The Anatomy of Protracted Violence in Sierra Leone" [online]. dalam http://www.fes.de/ipg/IPG2_2003/ARTKEEN.HTM [diakses August 28 2013].

Jurnal

- Abdullah, I., 1998. "Bush Path to Destruction: The Origin and Character of the Revolutionary United Front/Sierra Leone", *The Journal of Modern African Studies*, **36**(2): 203-235.
- Howe, HM., 1998. "Private Security Forces and African Stability: the Case of Executive Outcomes", *The Journal of Modern African Studies*, **36**(2): 307-331.

Working Paper

Davies, R 1996, "The Sierra Leone situation: the spill-over of the Liberian civil war into Sierra Leone: peace-making and peace-keeping possibilities," report, UN Institute for Training and Research/International Peace Academy, New York.

Ikome, FN., 2012. "Africa's International Borders as Potential Sources of Conflict and Future Threats to Peace and Security". Institute for Security Studies, No. 233.

Koning, RD., 2008, "Resource-Conflict Links in Sierra Leone and The Democratic Republic of the Congo", SIPRI Insights on Peace and Security, no. 2008/2.